SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

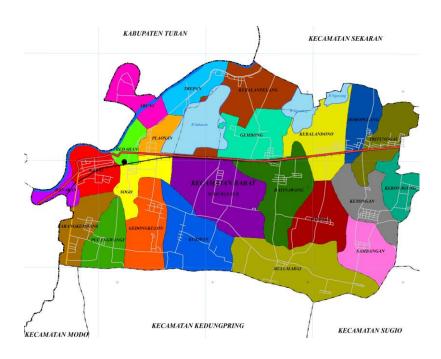
TAHUN 2021





GAMBARAN UMUM

Kecamatan Babat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata- rata ± 7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 07°04′15″Lintang Utara dan 07° 07′35″ Lintang Selatan, serta 112°09′47″ dan 112°15′29″ bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Babat adalah berupa daratan seluas 63,08 km2. Dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut:



TERDIRI DARI
2 KELURAHAN
& 21 DESA

BATASAN KECAMATAN BABAT

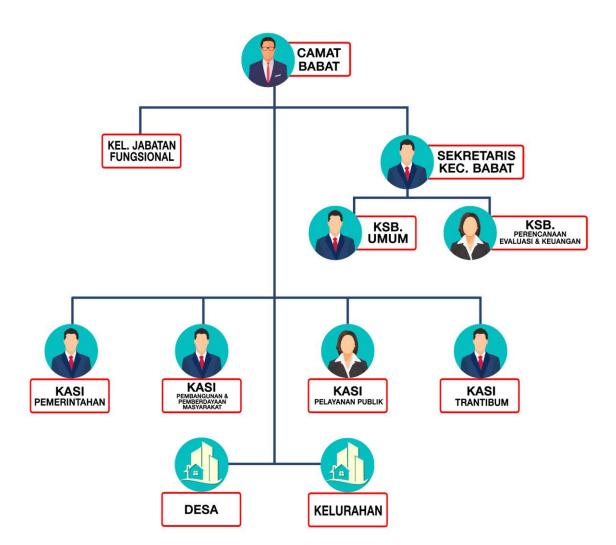
- (UTARA) Kec. Sekaran dan Kab. Tuban
- (TIMUR) Kec. Pucuk
- (SELATAN) Kec. Kedungpring Kec. Sugio Kec. Modo
- (BARAT) Kab. Bojonegoro

KONDISI KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk di Kecamatan Babat Per 1 Desember 2020 Kurang lebih sebanyak 90,431 Jiwa terdiri dari

- (Laki-laki) 45.295
- (Perempuan) 45.136
- (Jumlah KK) ???

SUMBER DAYA MANUSIA



KONDISI SDM KEC. BABAT KAB. LAMONGAN BERJUMLAH 34 ORANG TERDIRI ATAS :

BERDASARKAN STATUS

- PNS / CPNS : 24
- NON ASN : 10

BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU

- SMP:
- SMA:
- D-3 :
- S-1 :
- S-2 :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS

- Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. (PP 17/2018, PSL 10)

TUGAS

 Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. (Perbub 88/2016, psl 5)

FUNGSI

- Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- · Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- · Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan urusan program;
- Pelayanan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja di tingkat kecamatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. (Perbub 88/2016, psl 6)

VISI

TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI

- MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
- MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
- MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
- MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
- MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

RPJMD TAHUN 2016-2021

RPJMD

VISI

"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

MISI

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

RENSTRA

TUJUAN:

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

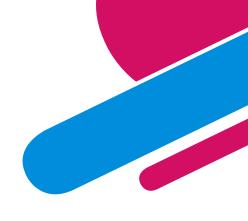
INDIKATOR
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

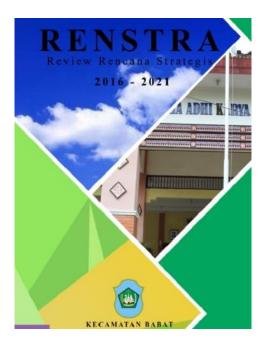
SASARAN

- MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT.
- TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN.

INDIKATOR:

- HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- PROSENTASE REKOMENDASI HASIL KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN, KETEMNTRAMAN, DAN KETERTIBAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN YANG HARUS DI TINDAK LANJUTI DALAM SATU TAHUN DI KECAMATAN BABAT.
- PROSENTASE DESA YANG TELAH MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN YANG BENAR DAN TEPAT.







N	10	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi awal	Targ	et Cap	aian S	etiap T	「ahun
	1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitas	Tujuan IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan	1. IKM	Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setiap Tahun	2016 79,24		2018 80,25			2021 81.76
		penyelenggaraan Pemerintahan Desa			2. Prosentase Capaian Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOPx 100 % Jumlah pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			koordinas pemerintaha dan Akuntabilita penyelengga	Akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan Desa	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, kententraman dan ketertiban, perekonomian, dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendas hasil koordinasi yang ditindaklanjutix 100 % Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Prosentase desa yang sudah menyusun Anggaran berbasis kinerja	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan berbasis kinerja x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Jumlah desa						

MATRIK RENSTRA KECAMATAN BABAT TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setiap Tahun	Dokumen IKM	Sekcam
		Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Prosentase pelayanan yang dilaksana kan sesuai dengan SOP	Laporan Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
			x 100 %		
			Jumlah pelayanan		
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan	Jumlah rekomendas hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Laporan dari semua Kasi	Semua Kasi
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	kemasyarakatan	x 100 %		
			Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi		
		Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran Berbasis Kinerja	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan berbasis kinerja	Dokumen APBDesa dan LPPD	Kasi Pemerintahan
			x 100 % Jumlah desa		

INDIKATOR KERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM			KEGIA	ΓΑΝ	
	KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81.26	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	2 item	36.500.000
Terlaksananya Penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan sosisal dan Pembangunan yang harus	100%	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Budang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, Sosial dan Pembangunan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	30.000.000
	ditindaklanjuti dalam satu tahun di Kecamatan Babat			Wilayah		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Kelurahan	1.390.000.000
Terlaksananya Penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Prosentase Desa yang telah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat	100%	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Peserta Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	23 Desa dan Kelurahan	133.000.000

PROGRAM RENCANA KINERJA T A H U N A N (RKT)TAHUN 2021



KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

	TUJUAN		SASARAN	CARA MENCAPA	I TUJUANDAN	KETERANGAN
				SASAF	RAN	
	Uraian	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	Meningkatkan	Meningkatnya	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan Sarana	Penyelenggaraan	Seluruh Seksi
•	Kepuasan	kualitas pelayanan		dan Prasarana	Pemerintahan dan	
	Masyarakat terhadap	masyarakat		Pelayanan	Pelayanan publik	
	Pelayanan di			Administrasi		
	Kecamatan			Kependudukan		
		Terlaksananya	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi		Pemberdayaan	
		Penyelenggaraan	bidang pemerintahan, Ketentraman dan		Masyarakat Desa	
		pemerintahan dan	Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan		dan Kelurahan	
		pembangunan	sosial dan Pembangunan yang harus			
		Kecamatan	ditindaklanjuti dalam satu tahun di			
		7	Kecamatan Babat			



		SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN			ANGGARAN	KET
Uraian 🔑		Indikator Kinerja	Target	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	(RP)	
Meningkatnya	1.	Hasil Survey	81,26	Penyelenggaraan	Penyelengg	Persentase	Item	2 item	36.500.000	Seluruh
kualitas		Kepuasan Masyarakat		Pemerintahan dan	araan	Peningkatan				Seksi
pelayanan		(SKM)		Pelayanan publik	Pemerintah	Kualitas				
masyarakat	2.	Prosentase			an dan	Pelayanan				
		rekomendasi hasil	100%		Pelayanan	Kecamatan				
		koordinasi bidang			Publik					
		pemerintahan,								
		Ketentraman dan								
		Ketertiban,								
		Perekonomian,								
		Kesejahteraan sosial								
		dan Pembangunan								
		yang harus								
		ditindaklanjuti dalam								
		satu tahun di								
		Kecamatan Babat								



KESELARASAN RENJA DENGAN RKA 2021

			SASARAN			PROGRAM		KE	GIATAN		ANGGARAN
	URAIAN		INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	(RP)
			KINERJA								
4	Meningkatn	1.	Hasil Survey Kepuasan	81.26	Penyelengga	Persentase	100%	Penyelenggaraan	Jumlah	2 Item	36.500.000
	ya Kualitas		Masyarakat (SKM)		raan	Peningkatan		Urusan	Peningkatan		
4	Pelayanan	2.	Terlaksananya		Pemerintaha	Kualitas		Pemerintahan yang	Efektifitas		
	Publik di		Penyelenggaraan		n dan	Pelayanan		tidak dilaksanakan	Pelaksanaan		
	Kecamatan		pemerintahan dan	100%	Pelayanan	Kecamatan		oleh Unit Kerja	Pelayanan		
			pembangunan		publik			Perangkat Daerah			
			Kecamatan			†		yang ada di			
								Kecamatan	/		

TABLE SLIDE

	RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN AI SATUAN KERJA PERANGKAT DAE			Formulir RKPA - RINCIAN BELA	NIA SKPD	
Pen	nerintah Kabupaten Lamongan Tahun A					
Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Program Sasaran Program Capaian Program Kegiatan Organisasi Unit Alokasi Tahun 2020 Alokasi Tahun 2021	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN : 7.01 KECAMATAN : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN I' : Indikator Targe Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Per : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Babat : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Babat : Rp. 0 : Rp. 36.500.000 : Rp. 0	et 5 nerintahan yang tidak Di	ilaksanakar	n oleh Unit Keria Perangkat Daerah ya	ng ada di Kecamatan	
	Indikator 	& Tolok Ukur Kinerja	Keglatan	<u> </u>		
Indikator	Sebelum Perubahar			Setelah Perubahan		
mulkatur	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatar	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100 %	Persenta: Kecamata	se Peningkatan Kualitas Pelayanan an	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 36.500.000	Dana yan	g dibutuhkan	Rp. 36.500.000	
Keluaran	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	2 item	jumlah Pe Pelayana	eningkatan Efektifitas Pelaksanaan n	2 item	
Hasil	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM Terlaksananya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	5000 layanan	Jumlah C	apaian layanan Publik	5000 layanan	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BABAT

Jl. Raya Bedahan No. 70 Telp. (0322) 451016 ê-mail:.babat@lamongankab.go.id web site:www.lamongankab.go.id Babat (62271)

KEPUTUSAN CAMAT BABAT Nomor: 188/ Ol /KEP/413.305/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT BABAT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan

> b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu meningkatkan IKU Sekretariat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Apartur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten LamonganTahun 2016-2021
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah kabupaten Lamongan.

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan

kepada Bupati Lamongan.

KETIGA

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan

: Babat

PadaTanggal: 04 Januari 2021

CAMAT BABAT

Ir.MULKAN, MM Pembina Tingkat I NIP.19640714 198711 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

: KECAMATAN BABAT 1. Instansi

2. Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

3. Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

4. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

: Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan 5. Tugas

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

6. Fungsi : a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum :

b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan;

c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;

e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; Pelaksanaan Urusan Program :

Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;

h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan	Dokumen IKM
		Prosentase Pelayanan Publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP	Jumlah Pelayanan yang sesuai dengan SOPX 100% Jumlah Pelayan	Laporan Petugas Pelayanan PATEN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang diindakanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun	Laporan dari semu Kasi
		Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK)	Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerjax 100 % Jumlah desa	Dokumen APBDes dan Perdes

CAMAT BABAT

Pembina Tingkat I

NIP 19640714 198711 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BABAT

Jl. Raya Bedahan No. 70 Telp. (0322) 451016 e-mail:.babat@lamongankab.go.id web site:www.lamongankab.go.id Babat (62271)

KEPUTUSAN CAMAT BABAT Nomor: 188/02 /KEP/413.305/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KANTOR KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT BABAT

Menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Babat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata caraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana;
- 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Babat dan Indikator Kinerja Individumasing- masing unit kerja di kecamatan Babat tersebut sebagaimana pada Lampiran 1.

KEDUA

- Indikator Kinerja Individu dimaksud pada Diktum ke Kesatu bertuiuan untuk :
- 1. Meberikan informasi kinerja yang pentingdan diperlukan dalam menyelenggaraan manajemen kinerja Organisasi;
- 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja danpeningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi;

KETIGA

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

PadaTanggal : Januari 2021

CAMAT BABAT

Ir. MULKAN, MM

Pembina Tingkat I NIP. 19640714 198711 1 003

Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Babat

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

: Merencanakan , melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan serta hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi	Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan adminitrasi terpenuhi	
2	Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana	
3	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Jumlah Pelayanan yang terlayani	
5	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat x 100% Jumlah Aparatur	

Indikator Kinerja Individu Kasubag Umum Kecamatan Babat

Kasubag Umum Kecamatan

Tugas

1. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata usaha kearsipan;

- 2. Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas tugas kehumasan dan keprotokolan ;
- 3. Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- 4. Melakukan urusan kepegawaian ;
- Mengumpulkan, menginyentarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program;
- 6. Menyusun program dan rencana kegiatan ;
- Mengola, memelihara dan menyajikan data kegiatan
- Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan bahan rapat koordinasi;
- Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja;
- 10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil hasilnya ;
- 11. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- 12. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor;
- 13. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil hasilnya bagi masyarakat luas ;
- 14. Membuat mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
- 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

CASE CADING

TUJUAN I	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		
Meningkatkan	Meningkatnya kualitas	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Urusan	36.500.000	1. [Data
Kepuasan	pelayanannasyarakat	Pemerintahan dan	Pemerintahan yang tidak		5	sarana
Masyarakat terhadap		Pelayanan Publik	Dilaksanakan oleh Unit		ķ	prasarana
pelayanan	Indikator:		Kerja Perangkat Daerah		ķ	pelayanan
Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan	Indikator:	yang ada di Kecamatan			
	Masyarakat (SKM)	Persentase			1. (Operator
Indikator :		Peningkatan	Indikator:		ŗ	pelayanan
Hasil Survey		Kualitas Pelayanan	Jumlah Peningkatan			Pelayanan
Kepuasan		Kecamatan	efektifitas Pelaksanaan		С	dan
Masyarakat (SKM)			Pelayanan		F	Pengolahan
						Data



CAMAT (ESELON 3A)



SEKCAM (ESELON 3A)



KASI (ESELON 4A)



STAF

CASE CADING

TUJUAN II	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		
Terwujudnya tata	Terlaksananya	Pemberdayaan	Koordinasi Kegiatan	30.000.000	-	Jadwal
Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraaan	Masyarakat Desa	Pemberdayaan Desa			Rapat
Desa yang baik	pemerintahan dan	dan Kelurahan			-	Bahan
	pembangunan Kecamatan		Indikator:			Rapat
		Indikator:	Jumlah Peningkatan		-	Rekapitulasi
	Indikator:	Persentase	Efektifitas Kegiatan			usulan
	Prosentase Rekomendasi	Peningkatan	Pemberdayaan			Kegiatan
	hasil Koordinasi Bidang	Kualitas Pelayanan	Masyarakat di Wilayah			
	Pemerintahan, Ketentraman,	Kecamatan	Kecamatan			
Indikator :	dan Ketertiban,		Kegiatan Pemberdayaan	1.390.000.000		
CAMAT	Perekonomian,		Kelurahan			STAF
(ESELON 3A)	Kesejahteraan sosisal dan				-	Data
Prosentase Desa	Pembangunan yang harus		Indikator :			Kegiatan
Mandiri	ditindaklanjuti dalam satu		Jumlah Pembangunan			Jadwal
	tahun di Kecamatan Babat		Sarana dan Prasarana			kegiatan
			Kelurahan		-	Administasi
						kegiatan









CASE CADING

TUJUAN II	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
		Pembinaan dan	Fasilitasi,	133.000.000	- Jadwal
		Pengawasan	Rekomendasi dan		Pembinaan
		Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan		- Data / bahan
			dan Pengawasan		pembinaan
					- Rapat koordinasi
			Indikator:		/ evaluasi
			Jumlah Peserta		
			Fasilitasi rekomendasi		
			dan Koordinasi		
			Pembinaan dan		
			Pengawasan		
			Pemerintah		

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.359.748.700
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.500.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.420.000.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	133.000.000



PERJANJIAN KINERJA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta bercrentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

ma : TEGUH BAGIO, S.STP, MM latan : Sekertaris Kecamatan Babat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. MULKAN ,MM Jabatan : Camat Babat

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen nerponangan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capalan kinegia dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghangaan dan sanksi.

> Pihak Kedua CAMAT BABAT

Ir. MULKAN, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19640714 198711 1 003

Babat, Januari 2021 Pihal/Pertama SEKRETARIS KECAMATAN

TEGUH BAGO IS.STP, MM Pemblaa NIP. 197801 11 199711 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKERTARIS KECAMATAN BABAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan balk	100%
2	Meningkatnya sarana prasarana yang memadai	Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%
3	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu	Prsentase jumlah dokumen pertencanaan,laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%
4	Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Babat	Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	B 81,26

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD	
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 25.000.000		
2	Program Penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik	Rp. 36.500.000	APBD	
3	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Rp. 133.000.000		
	Jumlah	Rp.194.500.000	APBD"	

Pihak Kedua CAMAT BABAT

Ir. MULKAN, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19640714 198711 1 003

NIP. 19780 17 199711 1 002

Babat, Januari 2021

Pihak Pertama

SEKRETARIŞ/KECAMATAN

ESELON III/b SEKCAM

ESELON III/a CAMAT

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAKHIDATUL QOMARIYAH, SE,MM Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Publik Kec. Babat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. MULKAN, MM Jabatan : Camat Babat

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua CAMAT BABAT

Ir. MULKAN, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19640714 198711 1 003

Babat, Januari 2021 Pihak Pertapra Kepala Seksi Pelayanan Publik

WAKHIDATUL QOMARIYAH, SE Pembina NIP. 19660504 198610 2 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Kepala Seksi Pelayanan Publik KECAMATAN BABAT

NO 1	SASARAN STRATEG	IS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 100	
	Meningkatnya pelaksanaan masyarakat di Kecamatan	pelayanan	Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat		

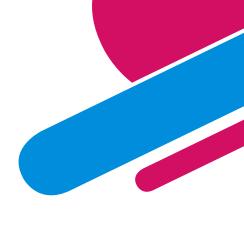
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN		
1	Pelaksanaan pelayanan masyarakat	Rp. 36.500.000	APBD		
-	Jumlah	Rp. 36.500.000 APBD			

Pihak Kedua CAMAT BABAT

Ir. MULKAN, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19640714 198711 1 003

Babat, Januari 2021 Pihak Pertama Kepala Seksi Pelayanan Publik

WAKHIDATU QOMARIYAH, SE.MM
Pembina
NIP. 19660504 198610 2 009



ESELON IV/a KASI

19

RENCANA AKSI TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
SASAKAN SIKATEGIS	INDIKATOR RINERJA		II	III	IV			
Meningkatnya kualitas	Hasil Survey Kepuasan				81,26			
pelayanan masyarakat	Masyarakat (SKM)				01,20			



No	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan		Out put /	Program	Kegiatan	Anggaran		
		TWI	TWII	TW III	TW IV	Keluaran			
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	√	√	√	√	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publilk	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 36.500.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARG	ET	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RINERJA	I	II	III	IV
	Prosentase Rekomendasi hasil				
	Koordinasi Bidang Pemerintahan,				
	Ketentraman, dan Ketertiban,				
	Perekonomian, Kesejahteraan				
Terlaksananya penyelenggaraan	sosisal dan Pembangunan yang				
pemerintahan dan pembangunan	harus ditindaklanjuti dalam satu				
Kecamatan	tahun di Kecamatan Babat				
	1. Prosentase Desa yang telah				
	menyusun Dokumen Perencanaan,				
	Penganggaran dan pelaporan yang				
	benar dan tepat				

RENCANA AKSI TAHUN 2021

	No	Aksi / Kegiatan	Ja	dwal Pe	laksana	an	Out put /	Program	Kegiatan	Anggaran
							Keluaran			
			TWI	TW II	TW III	TW IV				
	1	Peningkatan					Jumlah Keg.	Program Koordinasi		Rp 30.000.000
		Efektifitas Kegiatan	ı	ı	1	,	Pemberdayaan	Pemberdayaan	Kegiatan	
		Pemberdayaan,	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Masyarakat di	Masyarakat	Pemberdayaan	
		Masyarakat di					Wilayah	Desa dan	Desa	
		Wilayah Kecamatan					Kecamatan	Keluarahan		
	No	Aksi / Kegiatan		Jadwal Pe	elaksanaan		Out put / Keluaran	Program	Kegiatan	Anggaran
			TW I TW II TW III		TW III	TW IV				
			1 4 4 1	1 44 11	1 44 111	10010				
	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					Jmlh. Partisipasi Dalam Forum Musyawarah; Jmlh.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan	Rp 30.000.000
		Musyawarah Perencanaan					Partisipasi Dalam Forum	Keluarahan	Neluarariari	
		Pembangunan di Kelurahan	$\sqrt{}$				Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan			
			'				J J			
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Jmlh. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Rp 876.851.700
		Flasalalia Nelulaliali		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	yang dilaksanakan			
				\ \ \	\ \ \	٧				
	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	,	1	1	Jmlh. Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan			Rp 483.148.300
		Rejulatian	V	V	√	$\sqrt{}$	Madyaranar aintolaranan			
	5	Fasilitasi Administrasi Tata					Jmlh. Pembinaan Aparatur	Program Pembinaan dan	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Rp 33.000.000
	J	Pemerintahan Desa		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Pemerintahan Desa /	Pengawasan	Koordinasi Pembinaan dan	πρ 33.000.000
				V	V		Kelurahan	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa	
	6	Fasilitasi Pengelolaan					Jmlh. Desa melaksanakan		Desd	Rp 17.000.000
		Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2			$\sqrt{}$	Anggaran Berbasis Kinerja			
		i endayayunaan Aset Desa	V			V				



			MANAJE	MEN RES	SIKO KEC	CAMATAN E	BABAT				
			Resiko		Seba	ab		Dar	npak		
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	kode resiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	rencana tindak lanjut
Α	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat									
a.	, ,	peningkatan pelayanan kecamatan	kurangnya cakupan pelayanan kepada masyarakat		kecamatan	kurangnya sosialisasi pelayanan, sdm petugas dan sarpras kurang memadai	internal / eksternal		kurangnya jumlah jenis pelayanan yang ditangani dan diselesaikar	dan pemerintah	peningakatan sarana prasaranan pelayanan, peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat aerah yang ada di kecamatan		kurangnya pemahaman masyarakat dalam kecukupan dokumen syarat pengurusan surat ijin atau kependuduk an serta jenis pelayanan		kecamatan		internal / eksternal		keterlambat an pengurusan dan keluarnya surat ijin / kependuduk an	dan pemerintah	peningakatan sarana prasaranan pelayanan, peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat



b	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	ienis pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan presentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketrtiban, sosial dan pembangunan	sarana dan prasarana ruang pelayanan kurang memadai Kurangnya koordinasi dalam bidang pemerintaha n, trantib, sosial dan pembanguna n	kecamatan	kurang baik kurangnya	internal / eksternal internal / eksternal	terhambatny	masyarakat masyarakat dan pemerintah	melakukan perbaikan dan penataan ruangan melakukan pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas sdm dan monev kegiatan
1	pemberdayaan desa	efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	belum efektifinya kegiatan pemberdaya an masyarakat		kegiatan pemberdayaan tidak tepat sasaran	internal / eksternal	an kegiatan pemberdaya an hasilnya tidak maksimal di masayarakat		inventarisir kelompok / lembaga dan kebutuhan masyarakat sertamelaksanakan kegiatan pemberdayaan yang variatif
1	pemberdayaan masyarakat di wilayaha kecamatan	pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	belum efektifinya kegiatan pemberdaya an masyarakat	kecamatan	kegiatan pemberdayaan dianggap sebagai hal yang biasa karena materi yang berulang ulang	eksternal		dan	kegiatan pemberdayaan dan materinya di sesuaikan target yang dicapai dan kelompok masyarakay yang dibina



kegiatan pemberdayaan kelurahan	sarana dan prasaranan kelurahan	pengurangan kegiatan dan pelaksanaan tidak tepat waktu			internal / eksternal	menyesuaika n anggaran	pemerintah	mengusulkan kembali kegiatan pembangunan yang di refocusing
peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan	dalam forum musrenbang	tingkat partisipasi masyarakat yang menurun	kecamatan	banyak kegiatan yang diusulkan tidak bisa diakomodasi oleh pemerintah	eksternal	jumlah saran dan masukan dari masyrakat kurang	dan	mensosialisasikan pentingnya musrenbang dan program kegiatan pemerintah
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan	pengurangan kegiatan dan pelaksanaan tidak tepat waktu		refocusing anggaran	internal / eksternal	menyesuaika		mengusulkan kembali kegiatan pembangunan yang di refocusing
pemberdayaan masyarakat di kelurahan	organisasi masyarakat dikelurahan	belum efektifinya kegiatan pemberdayaa n masyarakat	kecamatan	- 3	internal / eksternal	hasil kegiatan pemberdayaa n tidak makasimal dan diabaikan	dan	kegiatan pemberdayaan dan materinya di sesuaikan target yang dicapai dan kelompok masyarakay yang dibina
orogram pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan , keamanan dan	Kurangnya koordinasi dalam bidang pemerintahan , trantib, sosial dan pembanguna n	kecamatan	kurangnya pemahaman tupoksi kelembagaan dan peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembanguan dan kemasyarakata	internal / eksternal	terhambatnya proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pemerintahan , keamanan, trantib, sosial dan pembanguna n	dan pemerintah	melakukan pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas sdm dan monev kegiatan
	persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan , keamanan dan ketertiban, sosial dan	pemberdayaa n masyarakat Kurangnya koordinasi dalam bidang pemerintahan , trantib, sosial dan	kecamatan	sebagai hal yang biasa karena materi yang berulang ulang kurangnya pemahaman tupoksi kelembagaan dan peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembanguan dan		makasimal dan diabaikan terhambatnya proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pemerintahan , keamanan, trantib, sosial dan	masyarakat dan pemerintah	masy melak kelem penin

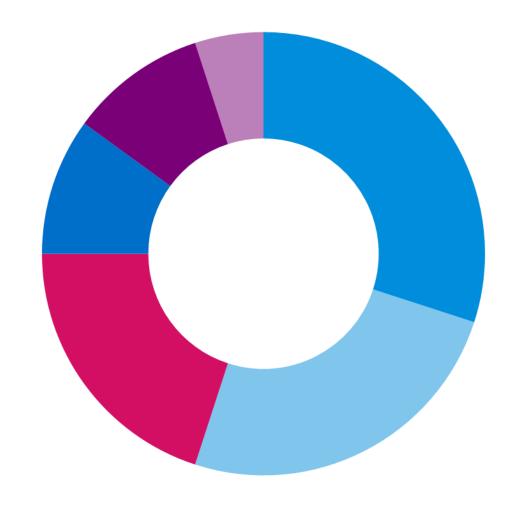


1	koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	kegiatan fasilitasi kurang efektif dan tidak tepat sasaran	kecamatan		internal /eksterna I	kegiatan pemerintah an, pembangun an dan kemasyarak atan tidak		melakukan pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas sdm dan monev kegiatan
1	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	jumlah pembinaan aparatur	aparatur pemdes / kelurahan			internal /eksterna I	berjalan dengan baik kegiatan pemerintah	masyarakat dan	mendorong pemerintah desa segera melakukan
		kelurahan	kurang memahami tupoksi	kecamatan	kemampuan dan jumlah kurang		pembangun an dan kemasyarak atan tidak berjalan dengan baik		pengisian perengkat yang kosong dan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas
	desa	melaksanakan anggaran berbasis kinerja	perencaan dan pelaksanaa n anggaran keuangan desa tidak tepat waktu		manusia aparatur baik kemampuan dan jumlah kurang	internal /eksterna I	pemerintah an, pembangun an dan kemasyarak atan tidak berjalan dengan baik	dan nemerintah	meberikan jadwal penyusunan perencanaan kegiatan serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
1	perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan	pembangunan yang dilaksanakan	tidak tepat	kecamatan	kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan	internal / eksternal	pemerintah	dan pemerintah	menyusun jadwal musrenbang, melakukan pembinaan dan mensosialisasikan program kegiatan pemerintah



1.4	fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		konfiik	kecamata	kesadaran masyarakat akan trantibum kurang	internal / eksterna I	gangguan	pemerintah	melakukan pembinaan wilayah dan penyelesaian konflik secara cepat		
1.9	fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyrakatan	pemerintah desa/ kelurahan	masih rendahnya anggota lembaga masyarakat dalam memahami tupoksinya		rendahnya pemahaman tupoksi dan sumber daya manusianya	I	pemerintah	pemerintah	bimbingan dan		





KEC. BABAT

PROBIS PROSES BISNIS TAHUN 2021

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN BABAT

PROSES TUJUAN

Badan/ Dinas /kelurah an / Desa INPUT - Regulasi - Anggaran - Sdm - Peran Serta Masyarak at

PROSES BISNIS MANAJEMEN

- 1. Pengelolaan Kinerja
- 2. Pengawasan Internal
- 3. Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS INTI

- Meningkatnya Kualitas
 Pelayanan Publik di
 Kecamatan Babat
- 2. Meningkatnya Koordinasi
 Pemerintahan dan
 Penyelenggaraan
 Pemerintahan Desa

PROSES BISM'S PENDUKUNG

- 1. Perencanaan
- 2. SDM
- 3. Peraturan
- 4. Anggaran
- 5. Sarana Prasarana
- 5. Teknologi Informasi

PELANGGAN (CUSTOMER)

- Aparatur
- Badan Hukum
- 3. Masyarakat

KELUARAN (OUTPUT)

- 1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

MANFAAT (OUTCOME)

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

RPJMD KAB. LAMONGAN 2016 -2021 RENSTRA KEC. BABAT 2016 - 2021





PROSES BISNIS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota

Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Perencanaan. Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah

Evaluasi kinerja perangkat daerah

Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah

Penyediaan jasa kom, air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan / triwulan / semestera skpd

> Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

milik daerah

penunjang urusan

pemerintah daerah

Penyelenggaraan rapa koordinasi san konsul skpd Pemeliharaan Barang

Administrasi Umum perangkat Daerah

Penyediaan komp intalasi listrik/penenerangan bangunan

Penyediaan logistik kantor

Penyediaan barang cetak dan ganda

Penyediaan Barang

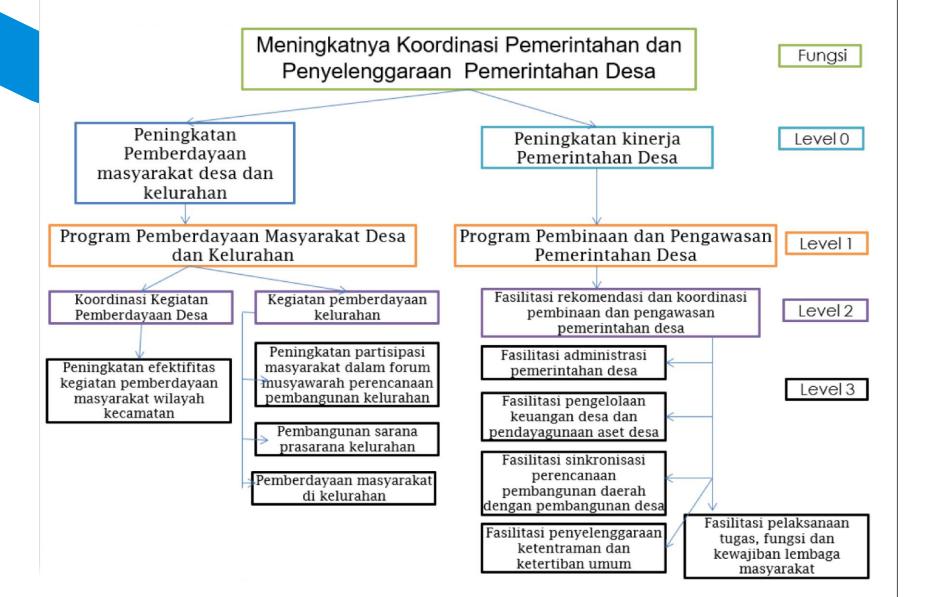
Bacaan dan peraturan

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyrakat di wilayah Kecamatan

Penyediaan jasa pemeliharanaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendraan dinas ops atau kendaraan dinas

Penyediaan jasa pemeliharanaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendraan perorangan dinas atau kendaraan dinas



UPLOAD WEBSITE

BERANDA

STRUKTUR ORGANISASI

LAYANAN PUBLIK

PRODUK UNGGULAN

PEMILU

SARANA PRASARANA

DESA DAN KELURAHAN

DOKUMEN



KECAMATAN BABAT 2021 TERIMA KASIH



PAPARAN SAKIP 2021
KECAMATAN BABAT KAB. LAMONGAN

